

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun lalu telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur menyurut. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Provinsi Kalimantan Timur kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus, dan konsisten.

Salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur untuk dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini merupakan jabaran dari Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan merupakan operasionalisasi dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023. Rencana Kerja memuat gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun (Tahun 2021) serta menjawab apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.2 Landasan Hukum

Dasar yang menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah sbb ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Tata Cara Rancangan Perda, RPJPD dan RPJMD) serta Tata Cara Perubahan (RPJPD, RPJMD dan RENJA Pemda) ;
9. Permendagri No. 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim ;
12. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ;
13. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Kerja ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai kurun waktu setahun yang lalu, disertai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam realisasi dan operasionalisasi program

dan kegiatan serta proyeksi dan target yang diharapkan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan setahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Anggaran 2019 dan Capaian Realisasi Terhadap Renstra PD
 - 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Anggaran 2019
 - 2.1.2 Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tela'ahan Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Perumusan Program Prioritas
- 4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2019 dan Capaian Realisasi Terhadap Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2019

Tabel 2.1 Rekapitulasi Realisasi Keuangan per 31 Desember 2019

Realisasi Keuangan Per 31 Desember 2019 (APBD-P)					
Jenis Belanja	APBD-MURNI	APBD-P	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	8.254.810.000	603.000.000	8.857.810.000	7.274.985.376	88,13
Belanja Langsung	9.924.535.000	1.104.500.000	11.029.035.000	10.171.209.667	92,22
Total	18.179.345.000	1.707.500.000	19.886.845.000	17.446.195.043	87,73

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran SIMDA Keuangan per 31 Desember 2019

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah murni dan anggaran perubahan (APBD-P) pada tahun anggaran 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 19.886.845.000,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 8.857.810.000,- dan Belanja Langsung Rp. 11.029.035.000,-. Berikut Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja sebagai berikut :

2.1.1.1 Belanja Tidak Langsung

Pada kegiatan ini merupakan penganggaran belanja wajib mengikat atau dalam arti lain pembiayaan penggajian/ tunjangan seperti, pembayaran gaji pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Jabatan, Iuran Asuransi Kesehatan, Biaya Insentif, pembiayaan Tunjangan Hari Raya dan pembiayaan tunjangan lainnya.

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan BTL

Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung (BTL)				
Jenis Belanja	Pagu APBD-P	Realisasi	Silpa	%
Belanja Tidak Langsung	8.857.810.000	7.274.985.376	979.824.624	88,13

Sumber : Laporan Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung SIMDA

Pada tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung (BTL) memiliki serapan anggaran yang cukup rendah dari target yang diinginkan, adapun kendala yang menyebabkan rendahnya serapan sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan BTL diprediksikan penambahan dan permintaan PNS sampai dengan 10 (sepuluh) orang, akan tetapi terpenuhi permintaan hanya 2 (dua) orang PNS.
2. Terdapatnya beberapa pegawai yang pensiun sehingga anggaran yang sudah dialokasikan tidak dapat direalisasikan.

2.1.1.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (PAP), yang dimana didalam kegiatan ini merupakan penganggaran untuk kegiatan operasional seperti, pembayaran gaji non PNS, biaya listrik, air, telepon, biaya *fotocopy*/cetak/penggandaan, honor-honor pengelola keuangan dan pembayaran operasional lainnya untuk mendukung kegiatan perkantoran.

Tabel 2.3 Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg PAP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	2.991.264.800	12 Bulan	2.798.980.062	100	93,57
Pengukuran Kinerja Program	72 SKM	2.991.264.800	88 SKM	2.798.980.062	122	93,57

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.3 diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan kegiatan operasional pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan baik, walaupun terdapat jumlah sisa anggaran, maka dapat dijelaskan penyebab sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai berikut :

1. Pada rekening belanja honor pengelola keuangan terdapat pegawai Esselon III yang pensiun pada akhir tahun sehingga honor tersebut tidak terealisasi (Silpa : Rp. 45.000.000,-).
2. Pada rekening beban listrik, air dan telepon terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 122.455.738,-. Karena pada rekening ini dibayarkan sesuai kebutuhan dan pemakaian.

2.1.1.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana, yang dimana didalam kegiatan ini merupakan penganggaran pengadaan sarana dan prasarana seperti kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan pengadaan barang/ belanja modal.

Tabel 2.4 Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg Sarpras

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	14 Paket	1.150.416.000	14 Paket	1.075.508.065	100	93,49
Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	664.144.200	12 Bulan	582.551.987	100	87,71
Pengukuran Kinerja Program	6 Unit	1.814.560.200	6 Unit	1.658.060.052	100	91,38

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa didalam kegiatan ini terdapat belanja barang modal berupa peralatan dan perlengkapan kerja seperti pengadaan komputer, printer, mesin scanner, kamera, pendingin ruangan, televisi, tabung pemadam, notebook/ laptop, UPS (stabilizer) pada perangkat komputer serta

perlengkapan peralatan yang dikhususkan pada ruangan Display Room DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur seperti pengadaan audio visual pada ruangan tersebut.

2.1.1.4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Tabel 2.5 Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg Peningkatan Kapasitas

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.854.000.000	12 Bulan	3.548.226.478	100	92,07
Pengukuran Kinerja Program	90 %	3.854.000.000	97,4 %	3.548.226.478	108,22	92,07

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada program ini terdapat kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, didalam kegiatan ini sebagian besar untuk pendanaan atau pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Pada kegiatan ini bersifat antisipatif/ undangan apabila ada undangan kegiatan akan dilaksanakan dan tidak dapat diprediksi secara pasti serta sebagian besar keputusan pelaksanaan kegiatan ini adalah kewenangan kepala dinas.

2.1.1.5 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Pada program ini terdapat kegiatan 2 (dua) kegiatan yaitu ; Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, didalam kegiatan ini merupakan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Perencanaan Program (Regram).

Tabel 2.6 Realisasi Kegiatan Rengram

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	9 Dokumen	251.500.000	9 Dokumen	212.837.500	100	84,63
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	59.777.500	100	99,63
Pengukuran Kinerja Program	51 Nilai AKIP	311.500.000	42,68 Nilai AKIP	272.615.000	83,69	87,52

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa didalam kegiatan Sub. Bagian Perencanaan Program (Rengram) tersebut sebagian besar sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) berasal dari pembiayaan/ belanja penggandaan, fotocopy dan penjiilidan. Serta melihat hasil kinerja dapat dilihat nilai AKIP tidak mencapai target dimana tahun 2019 mendapat nilai AKIP 42,68.

2.1.1.6 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan

Program ini merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, program ini terdapat 4 (empat) kegiatan : pelayanan perizinan sektor primer; sekunder-tercier; pelayanan penanaman modal; dan Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota. Kegiatan yang biasa dilakukan mengupgrade ISO Standar Manajemen Mutu, mengevaluasi *Standart Operating Procedure* (SOP), penerbitan izin usaha, peninjauan lapangan/ lokasi, dan sosialisasi penggunaan aplikasi izin usaha berbasis *online* seperti *Online Single Submission* (OSS).

Tabel 2.7 Realisasi Kegiatan Bidang LP2N

Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan								
Kegiatan	Target		Realisasi		%			
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu		
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	1000	Izin/ Non Izin	116.100.000	740	Izin/ Non Izin	99.100.000	74,00	85,36
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	1500	Izin/ Non Izin	30.650.000	1511	Izin/ Non Izin	30.350.000	101	99,02
prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	200	NIB	32.250.000	248	NIB	31.940.000	124	99,04
Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/ Kota	4	PTSP	42.000.000	4	PTSP	28.058.200	100	66,81
Pengukuran Kinerja Program	2700	Izin/ Non Izin	221.000.000	2251	Izin/ Non Izin	189.448.200	83,37	85,72

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.7 diatas dapat terlihat bahwa realisasi fisik pada program ini belum tercapai, namun upaya untuk mempermudah perizinan merupakan komitmen pimpinan, yaitu dengan pembangunan aplikasi OPO (Otomatisasi Perizinan Online) dan memfasilitasi bagi pengguna izin melalui *Online Single Submission* (OSS) yang bertujuan untuk melakukan percepatan dan kemudahan dalam hal peningkatan pelayanan perizinan.

2.1.1.7 Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi

Program ini juga merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu, kegiatan pemantauan dan evaluasi; kegiatan pembinaan dan

pengawasan; serta kegiatan pengolahan data. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan ISO, pemantauan lapangan/ perusahaan, pengisian LKPM manual/ *Online*, *Press Realease* Data Investasi yang dilakukan per triwulan dan membuat buku mengenai data investasi.

Tabel 2.8 Realisasi Kegiatan Bidang DALAK

Program Pengendalian dan Pelaksanaan Investasi						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	4 LKPM	59.100.000	4 LKPM	58.819.000	100	99,52
Penyusunan informasi penanaman modal	5 Dokumen	67.900.000	5 Dokumen	65.800.000	100	96,91
Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	10 Perusahaan	382.400.000	22 Perusahaan	353.600.000	220	92,47
Pengukuran Kinerja Program	25 Perusahaan	509.400.000	36 Perusahaan	478.219.000	144	93,88

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.8 diatas terutama pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal adalah merupakan kegiatan prioritas yang termasuk dalam agenda tematik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, realisasi fisiknya mencapai target bahkan melebihi target yang sudah ditentukan yaitu 220%. Yang dimana kegiatan ini terfokus kepada perusahaan industri kariangau yang ada di Kota Balikpapan sebagaimana menjadi lokus dan fokus pada kegiatan tersebut.

2.1.1.8 Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan penyusunan perencanaan dan kebijakan penanaman modal ; dan penyusunan kajian

pengembangan potensi daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan kajian kebijakan seperti membuat atau revisi Perda/Pergub dan membuat kajian potensi unggulan daerah.

Tabel 2.9 Realisasi Kegiatan Bidang P2IPM

Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	2 Dokumen	386.600.000	1 Dokumen	386.040.000	50	99,86
Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	1 Dokumen	146.000.000	1 Dokumen	145.530.000	100	99,68
Pengukuran Kinerja Program	1 Kebijakan	532.600.000	1 Kebijakan	531.570.000	100	99,81

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa pada program dan kegiatan ini secara serapan keuangan terserap dengan baik, akan tetapi terdapat 1 Dokumen Pergub Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum disetujui oleh Biro Hukum oleh karena itu akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap stakeholder yang terkait pada tahun anggaran 2020. Berikut kegiatan yang terlaksana pada tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif di KEK dan KI
2. Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

2.1.1.9 Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan pelayanan informasi perizinan ; dan pelayanan advokasi perizinan. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pengembangan media elektronik yang difokuskan kepada Sistem Informasi berbasis *Online* guna memberi informasi yang cepat kepada masyarakat luas sedangkan pada kegiatan penguatan kelembagaan PTSP bertujuan untuk menjaga status berpredikat bintang dengan cara mengevaluasi Sistem Prosedur Operasional, melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan baik antara Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pusat.

Tabel 2.10 Realisasi Kegiatan Bidang YANDU

Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Pelayanan Informasi Perizinan	1 Aplikasi	46.780.000	1 Aplikasi	45.100.000	100	96,41
Pelayanan Advokasi Perizinan	65 Kasus	85.130.000	33 Kasus	50.497.500	50,77	59,32
Pengukuran Kinerja Program	95 %	131.910.000	90 %	95.597.500	90	72,47

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa realisasi belum semua terserap dengan baik. Adapun kegiatan yang terlaksana pada kegiatan pelayanan informasi perizinan tahun anggaran 2019 ini merupakan lanjutan kegiatan tahun anggaran 2018 yaitu kegiatan Pengembangan/ upgrade aplikasi tentang Otomatisasi Perizinan *Online* (OPO) dimana aplikasi berbasis *online* ini hampir sama dengan pendaftaran izin usaha yang mirip dengan OSS yang membedakan adalah OSS

produk dari Kementerian sedangkan OPO produk dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.1.10 Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal ; dan peningkatan kerjasama penanaman modal. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan event-event pameran guna mempromosikan potensi dan peluang untuk berinvestasi, dan pelaksanaan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU).

Tabel 2.11 Realisasi Kegiatan Bidang P2M

Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	5 Event	618.800.000	7 Event	598.493.375	140	96,72
Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	2 Pertemuan Bisnis	44.000.000	0 Pertemuan Bisnis	0	0,00	0,00
Pengukuran Kinerja Program	2 MoU	662.800.000	0 MoU	598.493.375	0,00	90,30

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.11 dapat dijelaskan bahwa realisasi fisik maupun keuangan belum terserap dengan baik, hal ini disebabkan pada Kegiatan Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal tidak dapat direalisasikan. Adapun kegiatan yang terlaksana pada penyelenggaraan promosi penanaman modal tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Event Pameran Indonesia Product Expo 2019 Trade, Tourism and Investment, 4 -7 April di Jogja City Mall – DI. Yogyakarta ;

2. Event Pameran Nasional Kaltim FAIR 2019, 25 – 28 April, Convention Hall Sempaja, Samarinda ;
3. APKASI Expo 2019 Trade, Tourism and Investment, 3 – 5 Juli, Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan – Jakarta ;
4. Event Pameran Kaltim EXPO 2019, 21 – 25 Agustus, Convention Hall Sempaja, Samarinda ;
5. Bandung INAVEST 2019, 20 – 22 September 2019 di Braga City Walk – Bandung ;
6. Event Pameran Batu Fiesta Fair, 23 – 27 Oktober, Among Tani Balai Kota Batu ;
7. Event Pameran Gelar Pesona Kaltim 2019, 16 – 17 November, Anjungan Kalimantan Timur Taman Mini Indonesia Indah – Jakarta.

Pada kegiatan Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal pada tahun anggaran 2019 tidak dapat terealisasi dengan kendala sebagai berikut :

1. Outcome serta target tujuan perjanjian kerjasama adalah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan nomor : 119/600/BPPMD-Sekr/2014 dan Nomor : 120.13/1319/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Perjanjian Kerjasama Pengembangan Penanaman Modal dengan Provinsi Jawa Tengah tersebut telah berakhir pada tanggal 14 Juli 2019. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk perjanjian kerjasama penanaman modal berdasarkan nomor : 360/04-074/BKPM&PT/2012 dan nomor : 119/335/BPPMD-Sekr/2012 tanggal 25 Mei 2012 telah berakhir pada tanggal 25 Mei 2017.

2. Dalam pelaksanaan butir (1) diatas :

- Untuk pihak DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan perjanjian kerjasama, namun terlebih dahulu disesuaikan dengan perjanjian hubungan kesepakatan antar kedua Pemerintah Provinsi yang saat ini belum diperpanjang.
- Sedangkan pihak DPMPTSP Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dapat melaksanakan perpanjangan dikarenakan untuk tugas pokok dan fungsi kerjasama saat ini diserahkan ke pihak Biro Humas.
- Sehingga sampai akhir tahun anggaran 2019 kedua pelaksanaan diatas belum dapat dicarikan solusi sehingga kedua kegiatan tersebut tidak terealisasi.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai Dokumen RPJMD Kalimantan Timur DPMPTSP Prov. Kaltim memiliki dua Program Prioritas **Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan dan Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi**, perumusan program prioritas disepakati pada saat asistensi rencana kegiatan, dengan merujuk pada dokumen RPJMD 2019 s/d 2023. Pada tahun pertama masa jabatan kepala daerah data realisasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah dapat dinilai dan diukur karena Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari Masa jabatan kepala daerah. Lihat Tabel 2.12 Rekapitulasi Evaluasi Renja PD.

Tabel 2.12 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019

Perangkat Daerah : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Lembar Ke – 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana				
			(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA
2															
2	12														
2	12	1								7.874.535.000	9.924.535.000			15.000.000.000	16.240.900.000
2	12	1	1							7.874.535.000	9.924.535.000			15.000.000.000	16.240.900.000
2	12	7		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Terlayannya administrasi perkantoran			72%	100%	2.314.535.000	2.991.264.800	72%	3.362.050.000	3.000.000.000
2	12	7	1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran			12 bulan	12 bulan	2.314.535.000	2.991.264.800	12 bulan	3.362.050.000	3.000.000.000
2	12	8		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP Prov. Kaltim	Tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP Prov. Kaltim			100%	100%	2.095.000.000	1.807.060.200	6 unit	3.164.050.000	2.400.000.000

2	12	8	1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP Prov. Kaltim	Jumlah sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP Prov. Kaltim			14 paket	13 paket	1.790.000.000	1.142.916.000	10 paket	2.361.650.000	1.500.000.000
2	12	8	2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			12 bulan	12 bulan	305.000.000	664.144.200	12 bulan	802.400.000	900.000.000
2	12	9		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			95%	95%	300.000.000	2.954.000.000	92%	3.000.000.000	2.800.000.000
2	12	9	1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman dan jumlah belanja publikasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman dan jumlah belanja publikasi			12 bulan	12 bulan	300.000.000	2.954.000.000	12 bulan	3.000.000.000	2.800.000.000
2	12	10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah			51 Nilai AKIP	51 Nilai AKIP	220.000.000	311.500.000	61 Nilai AKIP	475.100.000	1.045.900.000
2	12	10	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran			9 Dokumen	9 Dokumen	180.000.000	251.500.000	9 Dokumen	345.700.000	845.900.000

2	12	10	2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			4 Laporan	4 Laporan	40.000.000	60.000.000	4 Laporan	129.400.000	200.000.000
2	12	18		Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan			2700 Izin/ Non Izin	2700 Izin/ Non Izin	350.000.000	221.000.000	13 Hari	1.495.000.000	1.000.000.000
2	12	18	2	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	Jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan	Jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan			1000 Izin/ Non Izin	1000 Izin/ Non Izin	100.000.000	116.100.000	1100 Izin/ Non Izin	1.037.700.000	250.000.000
2	12	18	3	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan			1500 Izin/ Non Izin	1500 Izin/ Non Izin	150.000.000	30.650.000	1500 Izin/ Non Izin	52.050.000	200.000.000
2	12	18	4	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan	Jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan			200 NIB	200 NIB	50.000.000	32.250.000	200 NIB	45.400.000	200.000.000
2	12	18	5	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh kualifikasi bintang dari BKPM RI	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh kualifikasi bintang dari BKPM RI			4 PTSP	4 PTSP	50.000.000	42.000.000	4 PTSP	359.850.000	350.000.000

2	12	27		Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri di Kariangau	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri di Kariangau			25 Perusahaan Industri Baru	25 Perusahaan Industri Baru	1.245.000.000	509.400.000	7 perusahaan industri baru	617.000.000	1.690.000.000
2	12	27	2	Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)			4 LKPM	4 LKPM	125.000.000	59.100.000	5 LKPM	83.600.000	250.000.000
2	12	27	3	Penyusunan informasi penanaman modal	Jumlah dokumen realisasi investasi Kalimantan Timur	Jumlah dokumen realisasi investasi Kalimantan Timur			5 Dokumen	5 Dokumen	120.000.000	67.900.000	5 Dokumen	226.000.000	240.000.000
2	12	27	4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi	Jumlah Investor yang mentaati regulasi investasi proyek PMA/PMDN	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi			7 Perusahaan	10 Perusahaan	1.000.000.000	382.400.000	5 Perusahaan	307.400.000	1.200.000.000
2	12	28		Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan penanaman modal	Jumlah kebijakan penanaman modal			1 Kebijakan	1 Kebijakan	295.000.000	532.600.000	2 Kebijakan	1.325.400.000	1.880.000.000
2	12	28	1	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Pergub tentang Penanaman Modal yang disusun	Jumlah Pergub tentang Penanaman Modal yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	220.000.000	386.600.000	2 dokumen	820.250.000	1.000.000.000
2	12	28	2	Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah kajian potensi unggulan daerah	Jumlah kajian potensi unggulan daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	146.000.000	3 Dokumen	505.150.000	880.000.000
2	12	29		Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Tingkat kepuasan layanan informasi perizinan	Tingkat kepuasan layanan informasi dan advokasi perizinan			100%	100%	280.000.000	131.910.000	100%	351.400.000	650.000.000

2	12	29	2	Pelayanan informasi perizinan	Jumlah layanan aplikasi perizinan yang dihasilkan	Jumlah layanan aplikasi perizinan yang dihasilkan			1 Aplikasi	1 Aplikasi	80.000.000	46.780.000	1 Aplikasi		191.400.000	350.000.000
2	12	29	3	Pelayanan Advokasi Perizinan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan			65 kasus	65 kasus	200.000.000	85.130.000	15 kasus		160.000.000	300.000.000
2	12	30		Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal			2 MoU	2 MoU	775.000.000	465.800.000	3 MoU		1.210.000.000	1.775.000.000
2	12	30	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Event Promosi	Jumlah Event Promosi			5 event	4 event	700.000.000	421.800.000	9 Event		1.000.000.000	1.500.000.000
2	12	30	2	Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah pertemuan bisnis	Jumlah pertemuan bisnis			2 Pertemuan Bisnis	2 Pertemuan Bisnis	75.000.000	44.000.000	5 Pertemuan Bisnis		210.000.000	275.000.000



= Program Pendukung Operasional



= Program Prioritas



= Program Pendukung Prioritas

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2016, tugas pokok DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah ***“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”*** dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang perizinan dan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang perizinan dan penanaman modal;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan penanaman modal;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
6. Peyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja adalah salah satu alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Capaian kinerja merupakan rambu atau tanda apakah sasaran kegiatan

yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik dapat menghasilkan informasi kinerja yang member indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya, bila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja, maka dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja pada dasarnya tidak hanya digunakan saat penyusunan laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja dapat juga merupakan komponen yang krusial sejak merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Adanya indikator kinerja menuntut perencanaan harus sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja bertujuan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang lebih sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjalankan misi Lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Isu-isu ini menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan skala prioritas selama lima (5) tahun kedepan.

Isu tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama. Terdapat empat belas (14) perubahan yang saat ini harus diperhatikan, yaitu ;

1. Liberalisasi perdagangan;
2. Pencapaian Milenium Development Goal's (MDG's);
3. Kenaikan harga produk pangan dan kelangkaan sumber energi;
4. Arus demokratisasi yang tidak bisa dibendung;
5. Terbukanya pasar bebas tenaga kerja (AFTA) Tahun 2015;
6. Pembatasan produksi sector primer (minyak, gas dan batu bara);
7. Pengembangan industry bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
8. Pembangunan dan pengembangan produktivitas sector pertanian dalam arti luas;
9. Pengembangan industri turunan minyak, gas dan batu bara;
10. Pengembangan industri pertanian dalam arti luas;
11. Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT);
12. Pengembangan sektor jasa, perdagangan dan keuangan;
13. Pengembangan industri pariwisata; dan
14. Pengembangan infrastruktur pendukung industri.

Berdasarkan isu-isu diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur perlu memberi perhatian pada isu yang berhubungan dengan peningkatan Iklim Investasi didaerah, karena sangat menentukan besar kecilnya modal yang diinvestasikan. Iklim Investasi merupakan perpaduan antara sumberdaya alam yang tersedia dan kreasifitas

dalam merencanakan dan mengorganisasikan antar kementerian dan lembaga terkait. Semangat otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada setiap provinsi dan kabupaten/ kota untuk lebih efektif dalam menarik investasi melalui strategi kemudahan dan insentif. Keadaan tersebut menimbulkan Iklim Persaingan yang kompetitif dan perlu didukung oleh kebijakan nasional dengan tidak membatasi atau mempersulit Iklim Investasi di Daerah.

Iklim usaha yang kondusif akan menaikkan realisasi investasi yang memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Perkembangan dunia usaha dan tren investasi global sangat mempengaruhi perluasan dan pertumbuhan sektor industri. Bidang agroindustri dan energi terbarukan diharapkan menjadi tulang punggung menuju visi Kaltim 2025. Setiap kebijakan diharapkan dapat mengurangi hambatan penanaman modal serta dapat menjadi stimulasi investasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal (Ranwal) RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2021 Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar Ke – 1 dari 4

Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Rancangan Awal RKPD	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Hasil Analisis Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
Total Rancangan Awal				27.000.000.000	Total Hasil Analisis Kebutuhan				30.000.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	73 %	19.610.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	73 %	19.610.000.000
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	16 Dokumen	890.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	16 Dokumen	890.000.000
<i>Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja</i>	<i>2 Dokumen</i>	65.000.000	<i>Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja</i>	<i>2 Dokumen</i>	65.000.000
<i>Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran</i>	<i>2 Dokumen</i>	12.000.000	<i>Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran</i>	<i>2 Dokumen</i>	12.000.000
<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen evaluasi kinerja</i>	<i>4 Dokumen</i>	11.000.000	<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen evaluasi kinerja</i>	<i>4 Dokumen</i>	11.000.000
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan</i>	<i>4 Laporan</i>	375.000.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan</i>	<i>4 Laporan</i>	375.000.000
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan</i>	<i>4 Dokumen</i>	427.000.000	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan</i>	<i>4 Dokumen</i>	427.000.000
Administrasi Keuangan		Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	10.120.000.000	Administrasi Keuangan		Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	13.120.000.000
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Samarinda	<i>Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan</i>	<i>24 Dokumen</i>	10.000.000.000	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Samarinda	<i>Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan</i>	<i>24 Dokumen</i>	13.000.000.000

<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	500 <i>Dokumen</i>	20.000.000	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	500 <i>Dokumen</i>	20.000.000
<i>Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi</i>	3000 <i>Dokumen</i>	40.000.000	<i>Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi</i>	3000 <i>Dokumen</i>	40.000.000
<i>Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan keuangan dan Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	1500 <i>Dokumen</i>	20.000.000	<i>Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan keuangan dan Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	1500 <i>Dokumen</i>	20.000.000
<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	Samarinda	<i>Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi</i>	2 <i>Laporan</i>	10.000.000	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	Samarinda	<i>Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi</i>	2 <i>Laporan</i>	10.000.000
<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan capaian kinerja</i>	4 <i>Laporan</i>	10.000.000	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan capaian kinerja</i>	4 <i>Laporan</i>	10.000.000
<i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran</i>	12 <i>Laporan</i>	15.000.000	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran</i>	12 <i>Laporan</i>	15.000.000
<i>Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran</i>	1 <i>Laporan</i>	3.000.000	<i>Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran</i>	1 <i>Laporan</i>	3.000.000
<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahun</i>	1 <i>Laporan</i>	2.000.000	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahun</i>	1 <i>Laporan</i>	2.000.000
Administrasi Umum		Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	6 Unit	8.000.000.000	Administrasi Umum		Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	6 Unit	8.000.000.000
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Samarinda	<i>Jumlah Surat masuk dan keluar yang dikendalikan</i>	2500 <i>Surat</i>	10.000.000	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Samarinda	<i>Jumlah Surat masuk dan keluar yang dikendalikan</i>	2500 <i>Surat</i>	10.000.000
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Samarinda	<i>Jasa komunikasi yang terbayarkan</i>	1000 <i>Mbps</i>	600.000.000	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Samarinda	<i>Jasa komunikasi yang terbayarkan</i>	1000 <i>Mbps</i>	600.000.000
		<i>Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan</i>	300 <i>M3</i>				<i>Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan</i>	300 <i>M3</i>	
		<i>Jasa Listrik yang terbayarkan</i>	15000 <i>kWh</i>				<i>Jasa Listrik yang terbayarkan</i>	15000 <i>kWh</i>	
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Samarinda	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan</i>	25 <i>Unit</i>	400.000.000	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Samarinda	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan</i>	25 <i>Unit</i>	400.000.000

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Samarinda	Jumlah PNS yang memiliki jaminan kesehatan	60 Orang	30.000.000	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Samarinda	Jumlah PNS yang memiliki jaminan kesehatan	60 Orang	30.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya (STNK)	12 Unit	20.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya (STNK)	12 Unit	20.400.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Samarinda	Jumlah surat keputusan kepala perangkat daerah tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan	1 Surat	763.200.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Samarinda	Jumlah surat keputusan kepala perangkat daerah tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan	1 Surat	763.200.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Samarinda	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	40 Unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Samarinda	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	40 Unit	300.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Samarinda	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang diadakan	38 Jenis	300.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Samarinda	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang diadakan	38 Jenis	300.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah barang yang dicetak	111334 Buah	60.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah barang yang dicetak	111334 Buah	60.000.000
		Jumlah barang yang digandakan	108000 Buah				Jumlah barang yang digandakan	108000 Buah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	8 Jenis	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	8 Jenis	40.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	50 Unit	400.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	50 Unit	400.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	20 Unit	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	20 Unit	10.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Samarinda	Jumlah makanan dan minuman yang diadakan	2500 Porsi	161.400.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Samarinda	Jumlah makanan dan minuman yang diadakan	2500 Porsi	161.400.000
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Samarinda	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350 Laporan	3.100.000.000	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Samarinda	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350 Laporan	3.100.000.000
Pengadaan Mobil Jabatan	Samarinda	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1 Unit	580.000.000	Pengadaan Mobil Jabatan	Samarinda	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1 Unit	580.000.000

<i>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Samarinda	<i>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan</i>	<i>1 Unit</i>	300.000.000	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Samarinda	<i>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan</i>	<i>1 Unit</i>	300.000.000
<i>Pengadaan Mebeleur</i>	Samarinda	<i>Jumlah mebeleur yang diadakan</i>	<i>15 Unit</i>	150.000.000	<i>Pengadaan Mebeleur</i>	Samarinda	<i>Jumlah mebeleur yang diadakan</i>	<i>15 Unit</i>	150.000.000
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	Samarinda	<i>Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara</i>	<i>1 Unit</i>	300.000.000	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	Samarinda	<i>Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara</i>	<i>1 Unit</i>	300.000.000
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan</i>	Samarinda	<i>Jumlah mobil jabatan yang dipelihara</i>	<i>6 Unit</i>	60.000.000	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan</i>	Samarinda	<i>Jumlah mobil jabatan yang dipelihara</i>	<i>6 Unit</i>	60.000.000
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Samarinda	<i>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara</i>	<i>12 Unit</i>	100.000.000	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Samarinda	<i>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara</i>	<i>12 Unit</i>	100.000.000
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur</i>	Samarinda	<i>Jumlah Mebeleur yang dipelihara</i>	<i>15 Unit</i>	15.000.000	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur</i>	Samarinda	<i>Jumlah Mebeleur yang dipelihara</i>	<i>15 Unit</i>	15.000.000
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor</i>	Samarinda	<i>Jumlah gedung kantor yang diperbaiki</i>	<i>5 Unit</i>	300.000.000	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor</i>	Samarinda	<i>Jumlah gedung kantor yang diperbaiki</i>	<i>5 Unit</i>	300.000.000
<i>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>		<i>Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</i>	<i>85 %</i>	600.000.000	<i>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>		<i>Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</i>	<i>85 %</i>	600.000.000
<i>Pengadaan Mesin/Kartu Absensi</i>	Samarinda	<i>Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan</i>	<i>0 Unit</i>	-	<i>Pengadaan Mesin/Kartu Absensi</i>	Samarinda	<i>Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan</i>	<i>0 Unit</i>	-
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	Samarinda	<i>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan</i>	<i>140 Stel</i>	150.000.000	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	Samarinda	<i>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan</i>	<i>140 Stel</i>	150.000.000
<i>Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan</i>	Samarinda	<i>Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan</i>	<i>0 Orang</i>	-	<i>Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan</i>	Samarinda	<i>Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan</i>	<i>0 Orang</i>	-
<i>Pengadaan Pakaian Korpri</i>	Samarinda	<i>Jumlah pakaian Korpri yang diadakan</i>	<i>0 Stel</i>	-	<i>Pengadaan Pakaian Korpri</i>	Samarinda	<i>Jumlah pakaian Korpri yang diadakan</i>	<i>0 Stel</i>	-

<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	Samarinda	<i>Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal</i>	<i>10 Orang</i>	100.000.000	<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	Samarinda	<i>Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal</i>	<i>10 Orang</i>	100.000.000
<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Samarinda	<i>Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan</i>	<i>2 Peraturan</i>	50.000.000	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Samarinda	<i>Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan</i>	<i>2 Peraturan</i>	50.000.000
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Samarinda	<i>Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>30 Orang</i>	300.000.000	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Samarinda	<i>Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>30 Orang</i>	300.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase pengembangan iklim penanaman modal	100 %	1.980.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase pengembangan iklim penanaman modal	100 %	1.980.000.000
<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>		<i>Jumlah kegiatan pemberian fasilitas insentif dan kemudahan</i>	<i>2 Kegiatan</i>	1.100.000.000	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>		<i>Jumlah kegiatan pemberian fasilitas insentif dan kemudahan</i>	<i>2 Kegiatan</i>	1.100.000.000
<i>Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal</i>	<i>1 Kebijakan</i>	1.000.000.000	<i>Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal</i>	<i>1 Kebijakan</i>	1.000.000.000
<i>Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal</i>	<i>1 Dokumen</i>	100.000.000	<i>Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal</i>	<i>1 Dokumen</i>	100.000.000
<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</i>		<i>Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi</i>	<i>2 Dokumen</i>	880.000.000	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</i>		<i>Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi</i>	<i>2 Dokumen</i>	880.000.000
<i>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur</i>	<i>1 Dokumen</i>	81.400.000	<i>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur</i>	<i>1 Dokumen</i>	81.400.000
<i>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi</i>	Samarinda	<i>Jumlah kajian peta potensi investasi</i>	<i>1 Kajian</i>	798.600.000	<i>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi</i>	Samarinda	<i>Jumlah kajian peta potensi investasi</i>	<i>1 Kajian</i>	798.600.000

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan promosi penanaman modal	100 %	1.410.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan promosi penanaman modal	100 %	1.410.000.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	10 Kegiatan	1.410.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	10 Kegiatan	1.410.000.000
<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	Samarinda	<i>Jumlah pertemuan promosi penanaman modal</i>	<i>3 Pertemuan</i>	429.000.000	<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	Samarinda	<i>Jumlah pertemuan promosi penanaman modal</i>	<i>3 Pertemuan</i>	429.000.000
<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	Samarinda	<i>Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi</i>	<i>7 Event</i>	981.000.000	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	Samarinda	<i>Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi</i>	<i>7 Event</i>	981.000.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penerbitan izin/non izin	100 %	1.750.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penerbitan izin/non izin	100 %	1.750.000.000
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan pengaduan yang diselesaikan	100 %	115.000.000	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan pengaduan yang diselesaikan	100 %	115.000.000
<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan</i>	Samarinda	<i>Jumlah pengaduan yang diselesaikan lintas kab/ kota</i>	<i>15 Kasus</i>	115.000.000	<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan</i>	Samarinda	<i>Jumlah pengaduan yang diselesaikan lintas kab/ kota</i>	<i>15 Kasus</i>	115.000.000
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Izin/ non Izin diterbitkan	1500 Izin/ non Izin	1.635.000.000	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Izin/ non Izin diterbitkan	1500 Izin/ non Izin	1.635.000.000

<i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Samarinda	<i>Jumlah kegiatan forum dan pelatihan</i>	<i>4 Kegiatan</i>	1.170.000.000	<i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Samarinda	<i>Jumlah kegiatan forum dan pelatihan</i>	<i>4 Kegiatan</i>	1.170.000.000
<i>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah Izin/ non Izin yang dipantau pelaksanaannya</i>	<i>50 Izin/ non Izin</i>	200.000.000	<i>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah Izin/ non Izin yang dipantau pelaksanaannya</i>	<i>50 Izin/ non Izin</i>	200.000.000
<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan</i>	Samarinda	<i>Jumlah pengaduan yang diselesaikan provinsi</i>	<i>15 Kasus</i>	115.000.000	<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan</i>	Samarinda	<i>Jumlah pengaduan yang diselesaikan provinsi</i>	<i>15 Kasus</i>	115.000.000
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi</i>	<i>10 Laporan</i>	150.000.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi</i>	<i>10 Laporan</i>	150.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	25 Perusahaan	1.700.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	25 Perusahaan	1.700.000.000
<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>		<i>Jumlah perusahaan PMA/ PMDN yang dilakukan pengendalian pelaksanaan</i>	<i>25 Perusahaan</i>	<i>1.700.000.000</i>	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>		<i>Jumlah perusahaan PMA/ PMDN yang dilakukan pengendalian pelaksanaan</i>	<i>25 Perusahaan</i>	<i>1.700.000.000</i>
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)</i>	<i>5 LKPM</i>	300.000.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)</i>	<i>5 LKPM</i>	300.000.000
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah perusahaan yang dibina</i>	<i>12 Perusahaan</i>	700.000.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah perusahaan yang dibina</i>	<i>12 Perusahaan</i>	700.000.000
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah perusahaan yang diawasi</i>	<i>12 Perusahaan</i>	700.000.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Samarinda	<i>Jumlah perusahaan yang diawasi</i>	<i>12 Perusahaan</i>	700.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Jumlah data yang diolah/ disajikan	8 Dokumen	550.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Jumlah data yang diolah/ disajikan	8 Dokumen	550.000.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data yang diolah/ disajikan	4 Dokumen	550.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data yang diolah/ disajikan	4 Dokumen	550.000.000
<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Samarinda	Jumlah data yang diolah/ disajikan	4 Dokumen	550.000.000	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Samarinda	Jumlah data yang diolah/ disajikan	4 Dokumen	550.000.000

Pada tabel 2.13 diatas merupakan rencana kerja tahun (n+1) yang dimaksud adalah rencana tahun anggaran 2021, merupakan perubahan dari Permendagri No. 13 tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 tahun 2019. Yang sekarang telah diketahui banyaknya perubahan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2021 dan terindikasi satu bidang khususnya Bidang Pelayanan Pengaduan (YANDU) akan hilang apabila mengacu pada Permendagri No. 90 tahun 2019, serta perubahan yang sangat mendasar adalah Perangkat Daerah sangat dimungkinkan untuk me-review kembali Renstra 2019-2023 Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kab/ Kota

Rancangan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah (PD) Kabupaten dan Kota yang mungkin akan diselenggarakan oleh Tim Perencanaan Daerah yaitu Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tela'ahan Kebijakan Nasional

Sejalan tujuan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, dimana arah tujuan tersebut adalah “*Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya*” yang memiliki permasalahan pokok sebagai berikut penjelasanya (lihat tabel 3.1) :

Tabel 3.1 Matriks RPJPD Prov. Kaltim

TUJUAN RPJPD	SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan	Daya saing investasi industri belum optimal	Regulasi terutama terkait perijinan yang belum efektif	Ketersediaan dan validasi terhadap data statistik dan spasial yang kurang mendukung
					Perubahan kebijakan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota

= Tujuan Utama RPJPD

Dengan permasalahan pada tabel 3.1 diatas maka strategi yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Mendorong berkembangnya Penanaman Modal diberbagai sektor yang mencakup Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dalam rangka meningkatkan persebaran.
2. Mendorong berkembangnya Penanaman Modal berbasis keunggulan daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja.

3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik di Pusat maupun di daerah.
4. Mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik penanaman modal.
5. Membangun sistem informasi secara elektronik untuk mempercepat pendaftaran izin dan prosesnya.
6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi berkenaan data rencana dan realisasi investasi serta mempublikasikannya ke instansi pemerintah/ swasta dan masyarakat luas.
7. Mengevaluasi dan merevisi SOP dilingkup DPMPSTSP Prov. Kaltim khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan.
8. Membuat dan merevisi berkenaan peraturan-peraturan kebijakan tentang percepatan dan kemudahan untuk berinvestasi.
9. Memberikan informasi kepada investor atau mitra kerjasama mengenai potensi dan peluang untuk berinvestasi.

Sejalan dengan kebijakan Nasional tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2016, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah *“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan goal yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan terukur melalui indikator dan standar yang sudah ditetapkan, maka terdapat beberapa penjelasan mengenai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah :

3.2.1 Tujuan

Sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tujuan DPMPTSP dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Aparatur Sipil Negara dan sarana dan prasarana penunjang ;
2. Mewujudkan percepatan dan kemudahan pelayanan perizinan ;
3. Mewujudkan pengendalian pelaksanaan investasi ;
4. Mewujudkan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal yang terintegrasi dan implementatif di kawasan strategis ;
5. Mewujudkan pelayanan advokasi dan informasi perizinan yang prima ;
6. Menyelenggarakan promosi dan kerjasama penanaman modal.

3.2.2 Sasaran Program Kegiatan

Sasaran program kegiatan DPMPTSP yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan visi dan misi Gubernur terpilih periode 2018-2023 Bapak Isran Noor dan Bapak Hadi Mulyadi terdiri dari enam sasaran yaitu:

1. Terlayaninya Administrasi Perkantoran yang berkualitas dan prima ;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP ;
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ;

4. Meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah ;
5. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Lebih Mudah dan Cepat ;
6. Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
7. Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Kebijakan yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi Provinsi ;
8. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan ;
9. Teridentifikasinya dan Terinfokannya Potensi dan Peluang Investasi di Kalimantan Timur serta Terselenggaranya MoU.

Sedangkan sasaran strategis merupakan bagian integral dalam suatu proses perencanaan strategis yang terfokus pada kegiatan tertentu serta adanya keterkaitan dengan dokumen RPJMD yang telah disepakati pada waktu forum-forum perencanaan kegiatan.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah lihat Tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)

No	Tujuan (Gubernur)	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2021
1	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang beerkelanjutan	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai Investasi	Triliun (Rp)	37,08
			Waktu penyelesaian proses perizinan	Hari	12
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90

Sumber data RENSTRA DPMPTSP Prov. Kaltim 2019-2023

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mencakup 6 program yang terdiri dari 11 kegiatan dan 55 sub kegiatan yaitu :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan dan anggaran yang terdapat beberapa rencana pendanaan sub kegiatan yang terdiri dari :

- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah ;
- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan ;
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah ;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah ;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan

Pada kegiatan ini merupakan rencana pendanaan untuk administrasi keuangan dan belanja gaji PNS dan Non PNS serta pendukung kegiatan pada bagian keuangan. Sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi ;
- Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan ;

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran ;
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran ;
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

3. Administrasi Umum

Kegiatan ini merupakan belanja mengikat pada perangkat daerah, karena pada kegiatan ini merupakan belanja rutinitas. Berikut sub kegiatan yang terdiri dari :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS ;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;

- Penyediaan Makanan dan Minuman ;
 - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;
 - Pengadaan Mobil Jabatan ;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ;
 - Pengadaan Mebeleur ;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan ;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur ;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ;
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal ;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

3.3.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

5. Pemeliharaan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
- Kegiatan ini terdapat beberapa rencana pendanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ;
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
6. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
- Sub kegiatan terdiri dari :
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi ;

3.3.3 Program Promosi Penanaman Modal

7. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
- Sub kegiatan terdiri dari :
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi ;
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

3.3.4 Program Pelayanan Penanaman Modal

8. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pada kegiatan ini terdiri hanya satu sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

9. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ;
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan ;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

3.3.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

10 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Pada kegiatan tersebut memiliki tiga sub kegiatan yang terdiri dari :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

3.3.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

11 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan ini terindikasi menjadi bidang baru pada tahun anggaran 2021, pada kegiatan ini hanya terdapat satu sub kegiatan yaitu

:

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Kegiatan Prioritas

Di dalam pembahasan forum Rencana Awal Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dirancang bahwa untuk rencana kerja tahun 2021 estimasi program prioritas terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dan Program **Pelayanan Penanaman Modal**. Pada program tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri/ perusahaan yang bernilai meningkatkan investasi di Kalimantan Timur, yang fokus utamanya dikawasan Kariangau dan Balikpapan sekitarnya. Berikut penyajian data berupa tabel dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2021

Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	12 Hari	1.750.000.000,00
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Perusahaan	1.700.000.000,00

4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana pendanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 yang sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur serta telah dianalisa ada beberapa program yang berubah Pada program kemudahan layanan dan percepatan proses perizinan yang semula targetnya adalah “izin/ non izin” menjadi “hari” penyesuaian dan kesepakatan ini diambil pada saat Musrenbang pada tanggal 16 dan 17 Januari 2019 silam. Dan pada program layanan advokasi dan informasi perizinan, merupakan kebijakan oleh kepala bidang Yandu perubahan indikator dan target merupakan penyesuaian kegiatan baru dan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidang Yandu.

Sedangkan nilai investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan target khusus yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, dan yang akan disepakati menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) milik DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Daerah (lihat Tabel. 3.2). Maka telah dirumuskan dan disajikan dalam bentuk tabel secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Program/ kegiatan pendukung prioritas (lihat Tabel 2.12) merupakan upaya untuk mendukung tercapainya sasaran program prioritas serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu fokus dari Visi dan Misi Kepala daerah tahun 2019-2023.

Tabel 4.2 Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Tahun 2022

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROG / KEG (BARU)	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30.000.000.000	33.000.000.000
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			30.000.000.000	33.000.000.000
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	73 %	22.610.000.000	24.750.000.000
2	18	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	16 Dokumen	890.000.000	988.000.000
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	65.000.000	65.000.000
2	18	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	12.000.000	12.000.000
2	18	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4 Dokumen	11.000.000	11.000.000
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	4 Laporan	375.000.000	425.000.000
2	18	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan	4 Dokumen	427.000.000	475.000.000

2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	13.120.000.000	14.120.000.000
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	24 Dokumen	13.000.000.000	14.000.000.000
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	500 Dokumen	20.000.000	20.000.000
2	18	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	3000 Dokumen	40.000.000	40.000.000
2	18	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	1500 Dokumen	20.000.000	20.000.000
2	18	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	2 Laporan	10.000.000	10.000.000
2	18	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	4 Laporan	10.000.000	10.000.000
2	18	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	12 Laporan	15.000.000	15.000.000
2	18	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	1 Laporan	3.000.000	3.000.000
2	18	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	2.000.000	2.000.000

2	18	01	1.03		Administrasi Umum	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	6 Unit	8.000.000.000	8.912.000.000
2	18	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang dikendalikan	2500 Surat	10.000.000	15.000.000
2	18	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi yang terbayarkan	1000 Mbps	600.000.000	600.000.000
						Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan	300 M3		
						Jasa Listrik yang terbayarkan	15000 kWh		
2	18	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	25 Unit	400.000.000	400.000.000
2	18	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS yang memiliki jaminan kesehatan	60 Orang	30.000.000	30.000.000
2	18	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya (STNK)	12 Unit	20.400.000	25.000.000
2	18	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah surat keputusan kepala perangkat daerah tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan	1 Surat	763.200.000	820.000.000
2	18	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	40 Unit	300.000.000	312.000.000
2	18	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang diadakan	38 Jenis	300.000.000	450.000.000
2	18	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	111334 Buah	60.000.000	65.000.000
						Jumlah barang yang digandakan	108000 Buah		
2	18	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	8 Jenis	40.000.000	40.000.000

2	18	01	1.03	13	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan</i>	50 Unit	400.000.000	700.000.000
2	18	01	1.03	15	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan</i>	20 Unit	10.000.000	10.000.000
2	18	01	1.03	17	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>Jumlah makanan dan minuman yang diadakan</i>	2500 Porsi	161.400.000	200.000.000
2	18	01	1.03	18	<i>Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	<i>Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	350 Laporan	3.100.000.000	3.500.000.000
2	18	01	1.03	20	<i>Pengadaan Mobil Jabatan</i>	<i>Jumlah mobil jabatan yang diadakan</i>	1 Unit	580.000.000	-
2	18	01	1.03	21	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan</i>	1 Unit	300.000.000	600.000.000
2	18	01	1.03	26	<i>Pengadaan Mebeleur</i>	<i>Jumlah mebeleur yang diadakan</i>	15 Unit	150.000.000	100.000.000
2	18	01	1.03	29	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	<i>Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara</i>	1 Unit	300.000.000	400.000.000
2	18	01	1.03	30	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan</i>	<i>Jumlah mobil jabatan yang dipelihara</i>	6 Unit	60.000.000	60.000.000
2	18	01	1.03	31	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara</i>	12 Unit	100.000.000	120.000.000
2	18	01	1.03	36	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur</i>	<i>Jumlah Mebeleur yang dipelihara</i>	15 Unit	15.000.000	15.000.000
2	18	01	1.03	39	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor</i>	<i>Jumlah gedung kantor yang diperbaiki</i>	5 Unit	300.000.000	450.000.000

2	18	01	1.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	85 %	600.000.000	730.000.000
2	18	01	1.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan	0 Unit	-	10.000.000
2	18	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	140 Stel	150.000.000	120.000.000
2	18	01	1.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0 Orang	-	50.000.000
2	18	01	1.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan	0 Stel	-	100.000.000
2	18	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	100.000.000	100.000.000
2	18	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	2 Peraturan	50.000.000	50.000.000
2	18	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	300.000.000	300.000.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	100 %	1.980.000.000	2.000.000.000
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pemberian fasilitas insentif dan kemudahan	2 Kegiatan	1.100.000.000	1.100.000.000
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Kebijakan	1.000.000.000	1.000.000.000
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000

2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	880.000.000	900.000.000
2	18	02	1.02	01	<i>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur</i>	1 Dokumen	81.400.000	100.000.000
2	18	02	1.02	02	<i>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi</i>	<i>Jumlah kajian peta potensi investasi</i>	1 Kajian	798.600.000	800.000.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	100 %	1.410.000.000	1.700.000.000
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	10 Kegiatan	1.410.000.000	1.700.000.000
2	18	03	1.01	01	<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah pertemuan promosi penanaman modal</i>	3 Pertemuan	429.000.000	600.000.000
2	18	03	1.01	02	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi</i>	7 Event	981.000.000	1.100.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin/non izin	100 %	1.750.000.000	1.800.000.000
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pengaduan yang diselesaikan	100 %	115.000.000	200.000.000
2	18	04	1.01	03	<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan</i>	<i>Jumlah pengaduan yang diselesaikan lintas kab/ kota</i>	15 Kasus	115.000.000	200.000.000
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Izin/ non Izin diterbitkan	1500 Izin/ non Izin	1.635.000.000	1.600.000.000
2	18	04	1.02	01	<i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah kegiatan forum dan pelatihan</i>	4 Kegiatan	1.170.000.000	1.000.000.000

2	18	04	1.02	02	<i>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Izin/ non Izin yang dipantau pelaksanaannya</i>	50 <i>Izin/ non Izin</i>	200.000.000	200.000.000
2	18	04	1.02	03	<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan</i>	<i>Jumlah pengaduan yang diselesaikan provinsi</i>	15 <i>Kasus</i>	115.000.000	200.000.000
2	18	04	1.02	04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	<i>Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi</i>	10 <i>Laporan</i>	150.000.000	200.000.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	25 Perusahaan	1.700.000.000	2.200.000.000
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan PMA/ PMDN yang dilakukan pengendalian pelaksanaan	25 <i>Perusahaan</i>	1.700.000.000	2.200.000.000
2	18	05	1.01	01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)</i>	5 <i>LKPM</i>	300.000.000	450.000.000
2	18	05	1.01	02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah perusahaan yang dibina</i>	12 <i>Perusahaan</i>	700.000.000	850.000.000
2	18	05	1.01	03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah perusahaan yang diawasi</i>	12 <i>Perusahaan</i>	700.000.000	900.000.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah data yang diolah/ disajikan	8 Dokumen	550.000.000	550.000.000
2	18	06	1.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang diolah/ disajikan	4 <i>Dokumen</i>	550.000.000	600.000.000
2	18	06	1.01	01	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Jumlah data yang diolah/ disajikan	4 <i>Dokumen</i>	550.000.000	600.000.000

BAB V

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disampaikan, untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan.

Selanjutnya kami mengharapkan agar alokasi dana yang sudah kami proyeksikan didalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan Anggaran RKPD tahun 2021 ini tidak mengalami perubahan secara signifikan dan dapat ditingkatkan, sehingga apa yang menjadi komitmen kami untuk meningkatkan realisasi investasi secara signifikan di Kalimantan Timur dapat terlaksana.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ttd.

Kepala Dinas PMPTSP